

LITERASI POLITIK UNTUK MENGATASI POLITIK UANG: PERSPEKTIF SEJARAH

Cici Nurawaddah Lukman¹, Nurafifahtul Khasanah Azis², Firdaus W Suhaeb³, Idham
Irwansyah Idrus⁴

nurawaddahlukmancici@gmail.com¹, nurafifahtulkhasanah@gmail.com²,

firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id³, idham.irwansyah@unm.ac.id⁴

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas adalah politik uang dalam pemilu. Dalam artikel ini, dari sudut pandang sejarah, dibahas bagaimana pengetahuan politik berpengaruh dalam menangani politik uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian literatur penelitian ini meneliti bagaimana kesadaran politik masyarakat berkembang dari masa ke masa dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik politik uang. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi politik yang lebih baik dapat mengurangi praktik politik uang melalui kesadaran yang lebih besar tentang hak politik, pengawasan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam pemilu. Selain itu, belajar dari pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pendidikan politik sangat penting.

Kata Kunci: Literasi Politik, Politik Uang, Pemilu, Sejarah, Demokrasi.

ABSTRACT

One of the main challenges in realizing a clean democracy with integrity is money politics in elections. In this article, from a historical perspective, it is discussed how political knowledge has been influential in dealing with money politics in Indonesia. Using the literature review method, this study examines how people's political awareness has evolved over time and how it has impacted on the practice of money politics. The results show that better political literacy can reduce the practice of money politics through greater awareness of political rights, community supervision, and active participation in elections. In addition, learning from historical experience shows that political education is crucial.

Keywords: Political Literacy, Money Politics, Elections, History, Democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang berarti sistem pemerintahannya memperjuangkan kedaulatan rakyat atas negara, yang berarti setiap keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus didasarkan pada kesepakatan umum yang diberikan secara bebas oleh masyarakat. Akibatnya, semua orang di Indonesia mengharapkan kehidupan demokratis.

Pada masa pemerintahan Soeharto, pemilihan umum, yang seharusnya membawa demokrasi ke dalam pemerintahan, hanya dianggap sebagai formalitas. Pemilu yang diadakan pada tahun 1997 adalah yang ketujuh sejak Negara Indonesia didirikan, dan keenam selama pemerintahan Orde Baru. Namun, yang menarik dari Pemilu 1997 adalah bahwa itu adalah pemilu terakhir di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada saat yang sama, terjadi gelombang protes dan kerusuhan di berbagai daerah. Pada saat itu, Orde Baru menghadapi kesulitan karena kepercayaan masyarakat yang menurun. Ketidakstabilan negara dan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis memperparah hal ini. Mengingat keadaan ini, tidak mengherankan bahwa masalah umum seperti mengubah hasil perhitungan suara. Ketidakstabilan negara dan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis memperparah

hal ini. Mengingat keadaan ini, tidak mengherankan jika masalah kecil yang biasa muncul menjadi masalah sensitif yang dapat menyebabkan konflik, seperti mengubah hasil perhitungan suara (Aryanto et al., 2023).

Setelah reformasi 1998, politik uang terus menyertai sistem politik Indonesia. Setidaknya, praktik ini mengakar dan membudaya karena kebiasaan dan sikap politik yang wajar dari masyarakat. Akibatnya, kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan nurani terbuka tidak lagi menjadi prioritas utama. Sehingga muncul paradigma baru di masyarakat bahwa beruang adalah penguasa (Alina, 2022).

Demokrasi Indonesia mengalami perkembangan dengan cepat setelah reformasi. Melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip persamaan dan keterbukaan bagi setiap warga negara, keinginan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkat. Salah satu bentuknya adalah pemilihan Kepala Daerah. Sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota hanya dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada, atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama kali diadakan pada Juni 2005 (Suyono & Suhartono, 2023).

Secara umum, dalam dua pemilu terakhir, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, uang terus menjadi strategi utama untuk mendapatkan suara pemilih. Selain itu, karena hari pencoblosan suara semakin dekat, sasaran utama pemilih akan semakin intens dan masif dilakukan. Dalam hal persepsi politik uang, dua aspek penting dari rasionalisme pemilih Indonesia saat ini adalah sebagai berikut: pertama, mereka lebih idealis, yang berarti mereka menolak atau tidak menyukai pemberian uang politik untuk kepentingan kekuasaan dan jabatan orang lain; kedua, mereka lebih pragmatis, yang berarti mereka menerima uang politik tersebut. Namun, masalah pilihan politik kembali ke hati nurani individu (Jati, 2022).

Dalam pelaksanaan beberapa pemilu, media sosial seperti Twitter, Facebook, instagram dan media sosial lainnya begitu populer digunakan. Bahkan media tersebut digunakan dalam melakukan kampanye politik, baik pada pemilihan Presiden tahun 2014 maupun tahun 2019. Namun seringkali media sosial ini mampu “menyulut” pertikaian diantara partai pendukung pasangan calon, dan akan berakhir jika pemilihan telah selesai dilaksanakan. Literasi politik merupakan bagian dari dalam proses demokrasi, karena berkaitan dengan partisipasi politik. Sehingga literasi politik sering dikaitkan dengan pemahaman dan pengetahuan, serta kesadaran politik masyarakat menyangkut proses pemilu (Isyanawulan et al., 2023).

Fenomena politik uang yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024 dalam sudut pandang (Because Motif) disebabkan oleh faktor internal dari masyarakat tersebut. Seperti kurang memahami pengetahuan politik mengakibatkan masyarakat belum mengetahui proses pemilu secara substansi dan latar belakang penyelenggaraan pemilu ini. Fenomena tersebut terjadi karena tingkat pendidikan yang ada di masyarakat tersebut, Sehingga pemahaman terhadap politik uang dan larangannya masih belum bisa dimengerti oleh masyarakat. Pengetahuan memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai bidang tak terkecuali bidang politik dan pemerintahan (Daniel et al., 2024).

Politik uang sangat umum di berbagai tempat. Dalam situasi seperti ini, uang adalah alat kampanye yang paling efektif untuk memanipulasi pemilih untuk memilih caleg tertentu. Bukan kecerdasan intelektual atau moralitas pribadi yang menentukan popularitas seorang caleg; sebaliknya, kekayaan keuangan adalah yang menentukan kemenangan

pemilu (Nurjulaiha et al., 2022).

Akan tetapi, pada kenyataannya pemilihan umum adalah kegiatan politik yang didasarkan pada uang, di mana calon pemimpin berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan membagikan sejumlah uang kepada mereka untuk memilih mereka sebagai pemimpin. Setelah terpilih, mereka akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pada masa kampanye melalui korupsi, membuat mereka tidak bekerja dengan baik dan terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka (Pane et al., 2020).

Menurut (Mahardika, 2024) Literasi politik mencakup pemahaman tentang sistem politik, pengetahuan tentang masalah politik, kemampuan untuk menganalisis informasi politik, dan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Terlepas dari berbagai sumber informasi yang diakses melalui berbagai media, khususnya media sosial, ada polarisasi politik yang terjadi di masyarakat modern. Dengan mayoritas pengguna media sosial termasuk dalam kategori pemilih pemula, rangkaian informasi hoax bertubi-tubi mewarnai media sosial, mengubah cara pembaca melihat perkembangan politik di Indonesia (Akhyar Anshori et al., 2023).

Dalam penelitian (Padilah & Irwansyah, 2023) menghasilkan temuan bahwa mencegah praktik uang yang harus diterapkan adalah penegakan aturan yang membentuk dasar hukum untuk praktik peraturan pemilihan dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilihan, dan Bawasl juga harus memperkuat upaya untuk mencegah kebijakan moneter. Dalam hal ini, literasi politik sangat penting untuk mengatasi penyelenggara pemilu dan manajer pemilu untuk menciptakan pilihan yang jujur dan adil.

Kemudian sejalan akan hal tersebut hasil penelitian (Syafitri et al., 2024) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) diperlukan langkah yang strategis yaitu tanggung jawab dari Pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan bahwa kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi politik dalam pencegahan politik uang.

Kemampuan politik adalah keterampilan dan keterampilan yang dibutuhkan setiap individu untuk mengembangkan demokrasi suatu negara. Kurangnya pengetahuan tentang isu-isu politik dan kegiatan politik membuat orang acuh tak acuh terhadap proses demokrasi dan gagal mengikuti dinamika politik wilayah tersebut. (Imrani et al., 2023). Pemilihan umum harus dilakukan dengan jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang berkualitas yang akan melaksanakan tugasnya kepada masyarakat tanpa menanggung biaya yang dikeluarkan selama kampanye. Ini akan memastikan bahwa pemimpin tersebut akan bertindak secara profesional dan tidak korupsi.

Peningkatan literasi politik dan pemahaman nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik yang sehat dan berkualitas. Dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pemilu dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah lokal (Irsat et al., 2024).

Literasi politik adalah poin penting pada proses demokrasi. Masyarakat kurang memahami demokrasi dan juga pemerintahan dengan baik jika tidak mempunyai pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik (Yhasmid, 2023). Dengan memiliki kemampuan literasi politik dengan baik, pemilih bisa menjadi pemilih yang sadar, berpikir kritis, dan mengikuti proses demokrasi dengan baik. Mereka dapat mengambil keputusan yang lebih aktif dan mendukung pemimpin dan kebijakan yang relevan dengan prinsip dan

keinginan masyarakat. (Al Hamid & Hamim, 2023).

Menurut Firmansyah (Dalam Alifah & Sari, 2020) politik uang terjadi karena semua oknum yang terlibat dalam urusan politik memandang penting materi. (Syafitri et al., 2024) juga berpendapat bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk memaksakan dan memengaruhi kepentingan pribadi maupun memengaruhi kelompoknya ataupun kelompok lain kepada pihak tertentu dengan memakai beragam sarana, termasuk uang.

Kemudian sejalan akan hal itu hasil penelitian (Rozy et al., 2020) menemukan bahwa kontestasi politik di Desa Sumberingin Kidul terdapat peristiwa politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya melakukan politik dengan sehat masih belum terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat pemilihan dibutuhkan pengawasan tidak hanya dari pihak pengawas pemilu saja namun juga agar masyarakat bisa melaporkan langsung jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang yang beberapa kali terjadi selama Pemilu maupun Pilkada dilaksanakan. Karena dalam Undang-Undang telah mengatur perbuatan money politics termasuk tindak pidana dan ada pula sanksi bagi pelakunya (Mardiah & Zitri, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu sangat penting untuk peneliti membahas mengenai peran literasi politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif sejarah yang telah terjadi dari beberapa daerah di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan historis dan analitis. Metode tinjauan literatur (*library research*) untuk menganalisis berbagai penelitian yang relevan dengan topik peran literasi politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu. Tinjauan literatur dipilih sebagai metode penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan, tanpa perlu mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali berbagai temuan sebelumnya tentang peran literasi politik dan pengaruh literasi politik terhadap kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu sehingga dapat mencegah terjadinya politik uang.

Pemilihan sampel dilakukan dengan mencari literatur yang relevan dan terpercaya dari berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan Sinta. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, serta penerbitan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah yang paling terkini dan dapat memberikan wawasan yang aktual. Literatur yang dipilih mencakup artikel-artikel yang meneliti literasi politik dan politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilu ditinjau dari sisi sejarah.

Kajian literatur yang digunakan mengharuskan relevan pada pembahasan utama judul artikel yaitu terkait dengan peran literasi politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu dalam pemilihan analisis data yang dibuat untuk mengekstrak topik data yang sama. Data yang dikumpulkan telah dianalisis untuk menemukan informasi untuk mendukung peneliti. Setiap elemen informasi dienkripsi untuk memfasilitasi identifikasi. Artikel yang tidak pantas telah dihapuskan untuk memfasilitasi tema.



Gambar 1 Alur Penelitian (Sanenek et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur dengan mengkaji berbagai artikel yang relevan tentang peran literasi politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kajian Studi Literatur

No	Artikel Pendukung	Temuan	Refleksi
1	Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang (Misra et al., 2021)	Ada indikasi kuat bahwa praktik politik uang terjadi dalam Pilkada Riau, di mana calon kepala daerah sering kali mengandalkan pengeluaran besar untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar pula kemungkinan kandidat untuk menang, menciptakan siklus di mana kebutuhan akan modal menjadi dominan dalam politik. Laporan keuangan dana kampanye dari pasangan calon sering kali hanya memenuhi formalitas administratif dan tidak mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dalam fungsi pengawasan.	Peningkatan literasi politik di masyarakat dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi praktik politik uang dalam pemilu, terutama ketika dianalisis melalui perspektif sejarah yang menunjukkan pola berulang dari hubungan clientelistic dan pengaruh sosiokultural yang menguatkan praktik korupsi. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi dan hak-hak politik mereka, pemilih dapat menjadi lebih kritis terhadap tawaran material dari kandidat, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel.
2	<i>Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections</i> (Faqi et al., 2023).	Praktek politik uang menjadi fenomena umum dalam pemilu di Indonesia. Terdapat pandangan bahwa pemilih pemula, seperti mahasiswa, cenderung lebih sadar dan rasional tentang pentingnya integritas dalam pemilu. Literasi politik yang baik di antara pemilih pemula dapat membantu mereka dalam memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk politik uang serta dampaknya terhadap proses pemilihan. Sebuah	Refleksi dari temuan jurnal ini menunjukkan bahwa literasi politik memiliki peran krusial dalam mengatasi politik uang dalam Pemilu. Dengan memahami sejarah, pemilih pemula dapat mengembangkan sikap kritis dan lebih berdaya dalam memilih, sehingga menciptakan perubahan positif dalam sistem pemilu Indonesia.

No	Artikel Pendukung	Temuan	Refleksi
		<p>pemahaman sejarah mengenai politik uang akan memberikan konteks yang lebih dalam tentang mengapa praktik ini terjadi dan bagaimana ia berkembang.</p>	<p>Pemahaman mendalam ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan program literasi politik yang menyentuh aspek sejarah untuk memberdayakan pemilih mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh politik uang.</p>
3	<p>Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman (Katarudin & Putri, 2020)</p>	<p>literasi politik adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Dalam konteks mengatasi politik uang, literasi politik dapat membantu pemilih memahami dampak negatif dari praktik tersebut dan mendorong mereka untuk memilih berdasarkan informasi yang benar. Penelitian menunjukkan bahwa literasi politik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula.</p>	<p>bahwa literasi politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Rekomendasi untuk mengatasi politik uang dalam pemilu adalah dengan memperkuat program literasi politik yang menasar semua lapisan masyarakat, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terpengaruh oleh praktik korup.</p>
4	<p>Pendidikan Literasi Dan Edukasi Politik Untuk Masyarakat Keboansikep Sidoarjo Dalam PILKADA Sidoarjo 2020 (Suyono & Suhartono, 2023)</p>	<p>Persepsi masyarakat terhadap literasi politik sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan tujuan individu. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengatasi politik uang, karena masyarakat yang kurang teredukasi mungkin lebih rentan terhadap tawaran yang tidak etis.</p>	<p>Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Literasi politik yang baik dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan menolak praktik politik uang yang merusak proses demokrasi.</p>
5	<p>Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu (Amal, 2022)</p>	<p>Praktik politik uang di Banten telah menjadi fenomena yang umum dalam setiap pemilu, menciptakan tantangan bagi demokrasi. Masyarakat cenderung menerima praktik ini sebagai hal yang lumrah, yang menunjukkan perlunya literasi politik untuk mengubah pandangan tersebut.</p>	<p>Meskipun ada upaya pencegahan dari Bawaslu, praktik politik uang tetap terjadi. Literasi politik yang rendah di kalangan masyarakat berkontribusi pada penerimaan praktik ini, sehingga pendidikan politik yang lebih baik diperlukan untuk menciptakan pemilih yang cerdas.</p>

Berdasarkan temuan dari tinjauan literatur mengenai peran literasi politik dalam mengatasi politik uang, dapat dilihat bahwa banyak pemilih melihat politik uang sebagai hal yang biasa dan telah dinormalisasi dalam budaya pemilu. Literasi politik berfungsi di sini untuk menantang normalisasi tersebut, mendorong pemilih untuk mengenali dan menolak praktik yang tidak etis. Sejarah menunjukkan bahwa cara-cara untuk mengatasi korupsi dalam pemilu pernah ada, dan pemahaman tentang keberhasilan dan kegagalan masa lalu dapat memperkuat argumen untuk perubahan di masa depan.

Politik uang sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik. Mengedukasi pemilih tentang sejarah politik uang termasuk asal-usulnya dan perubahan regulasinya dapat membantu menciptakan kesadaran di masyarakat. Ini adalah aspek penting dari literasi politik yang harus ditingkatkan untuk memberdayakan pemilih pemula, memungkinkan mereka mengambil sikap yang lebih aktif dan informasional dalam proses pemilu.

1. Perkembangan Politik uang di Indonesia

Pemilihan di Indonesia adalah studi kasus yang menarik yang menjelaskan dinamika pembelian dan penjualan suara di negara -negara hak cipta. Setelah reformasi pada tahun 1998, sistem multi-partai yang kompetitif diciptakan, tetapi mayoritas partai politik baru tidak cukup dapat diandalkan. Ideologi partai politik yang tidak jelas membuat orang membedakan antara partai (Kurniawan et al., 2023). Data Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang dibuat oleh BPS (2021), mengukur pengetahuan masyarakat tentang anti-korupsi dan seberapa permisif mereka terhadap politik uang. Hasilnya menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

Politik uang di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa Orde Baru, kontrol pemerintah yang ketat membatasi kompetisi politik. Namun, pasca-reformasi membuka peluang lebih besar bagi politik uang sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2023; Misra et al., 2021) menunjukkan bahwa dalam Pilkada Riau, calon kepala daerah sering mengandalkan pengeluaran besar untuk meningkatkan peluang kemenangan, menciptakan ketidaktransparanan dalam fungsi pengawasan.

Kalau masyarakat sejauh ini mengasumsikan bahwa praktik kebijakan moneter adalah bagian dari pertukaran sosial, itu akan menjadi bencana bagi demokrasi Indonesia. Hipotesis ini akan digunakan oleh partai -partai miskin untuk meminimalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka. Hasil kebijakan moneter adalah biaya politik yang tinggi, yang mengarah pada peluang korupsi (Atmojo & Pratiwi, 2022).

Pada awalnya, peran masyarakat setempat dalam merespon fenomena politik uang dapat dikatakan kurang maksimal karena kurangnya penanaman pendidikan politik dan dorongan dari berbagai pihak. Pada saat itu masyarakat hanya melaksanakan tindakan 'nomer piro wani piro' sehingga proses money politic terus melekat (Alina, 2022). Di periode berikutnya, gerakan tolak politik uang akhirnya muncul dan digalakkan, utamanya dengan memicu kesadaran kolektif dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Dengan waktu terus berjalan, masyarakat mulai menyadari diri mereka sendiri, yang pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gerakan yang memenuhi potensi dan kebutuhan masyarakat, didorong dan disokong oleh Bawaslu. Untuk memastikan keberhasilan gerakan Tolak Politik Uang, tidak terlalu sulit untuk mendorong orang untuk berpartisipasi.

Maka dari itu perkembangan politik uang di Indonesia sebaiknya harus di atasi sedini mungkin salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan literasi politik di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat memiliki kesadaran untuk memilih calon

pemimpinnya berdasarkan hati nurani bukan berdasarkan materi maupun uang yang dapat merubah pilihan mereka.

2. Peran Literasi Politik dalam Mengatasi Politik Uang

Literasi politik memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis terhadap politik uang. Menurut (Katarudin & Putri, 2020) literasi politik dapat meningkatkan kesadaran pemilih pemula dan mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna. Hal ini dibuktikan oleh (Faqi et al., 2023) yang menemukan bahwa pemilih pemula dengan literasi politik yang baik cenderung menolak politik uang karena memahami dampak negatifnya.

Pendidikan politik memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa politik uang memicu semua efek negatif yang berkelanjutan yang merugikan rakyat, termasuk munculnya korupsi politik. Hingga saat ini, pendidikan politik bagi masyarakat sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian (Alina, 2022) di suatu desa telah menggalakkan Gerakan anti politik uang sebagai sarana yang tepat untuk membangun tim desa yang secara teratur menanamkan narasi politik yang baik di masyarakat. Sebenarnya, melepaskan praktik politik yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Sejalan akan hal tersebut dalam penelitian (Pratama, 2022) memberikan beberapa Solusi dalam mengatasi politik uang yaitu dengan penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari pengaruh finansial. Maka dari itu dengan kolaborasi yang mendalam literasi politik memiliki peran yang penting dalam mengatasi politik uang di Indonesia.

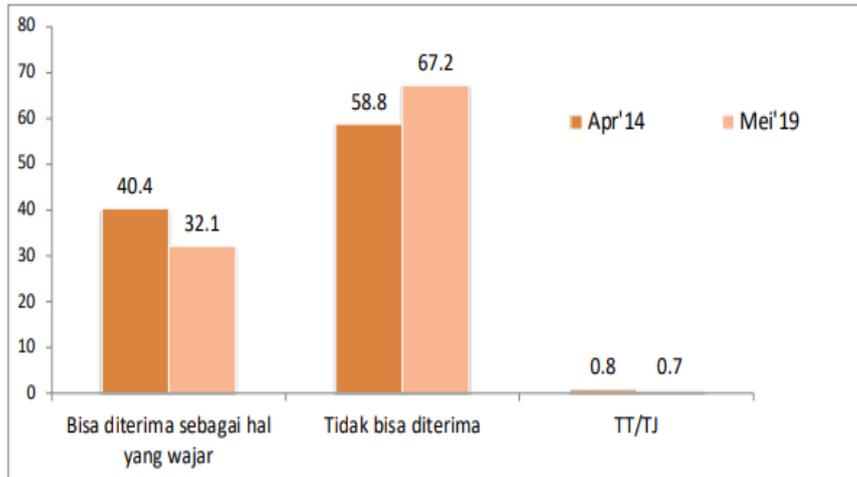
3. Pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan

Penelitian (Suyono & Suhartono, 2023) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengalaman dan tujuan individu berbeda-beda memerlukan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun resistensi terhadap politik uang. Selain itu, (Amal, 2022) perlunya pengawasan ketat dan edukasi politik yang menyeluruh di daerah dengan tingkat politik uang yang tinggi seperti yang terjadi di provinsi Banten. Kesimpulannya, pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang.

Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik dapat membentuk generasi muda yang sadar politik. Serta Penggunaan media massa dan platform digital untuk menyebarkan informasi politik yang edukatif dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan politik.

4. Sejarah Historis Dalam Mengatasi Politik Uang

Refleksi dari berbagai periode sejarah menunjukkan bahwa upaya edukasi politik harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas. Literasi politik tidak hanya memberikan pemahaman kritis tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menolak politik uang sebagai budaya yang merusak demokrasi. Oleh karena itu, pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa kombinasi antara literasi politik dan penegakan hukum yang kuat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memerangi politik uang.



Gambar 2 Toleransi terhadap Money Politic dalam Perilaku Memilih
Sumber (Jati, 2022)

Pada pemilu tahun 2014-2019 dalam tabel tersebut menunjukkan prosentase besar sikap tidak mentoleransi pada perilaku politik uang dalam pemilu dibandingkan dengan mereka yang mentoleransi. Adapun mereka yang mentoleransi politik uang ini prosentasenya minoritas. Meskipun rasionalisme pemilih mulai menguat, namun tidak juga bisa menjamin bahwa praktik politik uang sepenuhnya bisa hilang di Indonesia. Politik uang sendiri telah menjadi semacam alat transaksi politik (*bargaining politics*) demi pemenuhan kepentingan elektabilitas baik itu para kandidat maupun partai politik. Adapun berbagai studi sosial politik otoritatif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa politik uang suatu keharusan dan *taken for granted* dalam penyelenggaraan pemilu (Jati, 2022).

Hingga sekarang masyarakat yang memiliki literasi politik tinggi lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, sehingga cenderung menolak tawaran politik uang. Kemudian Literasi politik yang baik mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan proses pemilu, sehingga dapat meminimalisir praktik politik uang.

Pembelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa upaya edukasi politik harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas. Literasi politik tidak hanya memberikan pemahaman kritis tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menolak politik uang sebagai budaya yang merusak demokrasi.

KESIMPULAN

Meningkatnya pengetahuan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan praktik politik yang menggunakan uang dalam pemilu. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap calon yang menggunakan politik uang sebagai strategi kampanye karena kesadaran akan hak dan kewajiban politik. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa politik uang berkembang dengan cepat di lingkungan dengan pendidikan politik yang rendah. Oleh karena itu, literasi politik adalah alat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif untuk menentang praktik tersebut.

Pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting untuk menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk meningkatkan literasi politik di semua lapisan masyarakat. Dengan menyediakan pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami dampak politik uang terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis dalam jangka panjang.

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa mengatasi politik uang membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan edukasi politik yang mendalam. Ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun sistem demokrasi yang lebih jelas dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang politik sangat penting untuk menjamin pemilu yang adil dan bebas dari politik uang.

Untuk mengalahkan politik uang dalam pemilu, literasi politik sangat penting. Dalam sejarah, terbukti bahwa meningkatkan pemahaman politik masyarakat dapat secara bertahap mengurangi praktik politik yang bergantung pada uang. Pendidikan politik yang teratur dan sistematis sangat penting untuk mengembangkan pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Akibatnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan literasi politik dan mendorong pemilu yang bebas dari politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Anshori, Rudianto, & Jehan Ridho Izharshyah. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Al Hamid, S., & Hamim, U. (2023). Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur. In *Jurnal Pengabdian Pedagogika* (Vol. 01, Issue 02).
- Alifah, N. N., & Sari, M. (2020). *Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari*. 08(02), 671–686.
- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 145–163. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>
- Amal, I. (2022). *Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu*.
- Aryanto, D., Sekaran, N. S., Gunungpati, K., Semarang, K., & Tengah, J. (2023). Menelisis Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto. In *Jurnal Nirwasita* (Vol. 4, Issue 2).
- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 5, Issue 1). [Http://Ejournal.Bsi.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Abdimas](http://Ejournal.Bsi.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Abdimas)
- Daniel, R., Simatupang, P., Atthahara, H., Resmana Adiarsa, S., Program,), & Pemerintahan, S. I. (2024). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum : Studi Fenomenologi Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024. In *Communnity Development Journal V Ol* (Vol. 5, Issue 6).
- Faqi, A. F., Hasrul, Muh., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.V9i1.981>
- Imrani, R. A., Suteja, N. J., & Juddi, Moh. F. (2023). Literasi Politik Berbasis Media (Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Kota Surabaya). *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.33822/Jep.V6i1.4421>
- Irsat, Bongso, H., Asmadianto, & Miswati, R. (2024). *Penguatan Literasi Politik Dan Nilai Demokrasi Di Kampung Waromi Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor*. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/JPM/article/view/438>
- Isyanawulan, G., Yulasteriyani, & Hendarso, Y. (2023). Pendidikan Literasi Politik Untuk Siswa SMA Negeri 25 Kabupaten Banyuwangi. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 33–38. <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i1.156>
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70–84. <https://doi.org/10.55108/Jap.V5i2.195>
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). *Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih*

- Pemula Pada Pemilu Kota Pariaman Tahun 2018*. 70(2), 70–79.
- Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., & Rahmawati, N. (2023). *Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang*. 3, 9179–9192.
- Mahardika, I. (2024). *Pemahaman Literasi Politik Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sma Negeri 1 Pandeglang*. 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.Xxxx/Jlm.Vxix.Xxx>
- Mardiah, F., & Zitri, I. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 1.
- Misra, F., Sudarmoko, S., Apriwan, A., Hakim, A., Ichsan Kabullah, M., & Rahman, F. (2021). Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 43–56. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V7i1.724>
- Nurjulaiha, S., Rafni, A., Pancasila Dan Kewarganegaraan, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Padang Jl Hamka, U., & Author, C. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi). In *Indonesian Journal Of Social Science Review* (Vol. 1, Issue 2).
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Pane, M. D., Sukmadiningrat, F., & Rasyid, M. N. (2020). *Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Terkait Pilkadaes Serentak 2019*.
- Pratama, I. N. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*. 1, 761–767.
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurrozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Sanenek, A. K., Nurhafizah, N., Suryana, D., & Mahyuddin, N. (2023). Analisis Pengembangan Kemampuan Motorik Halus pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1391–1401. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4177>
- Suyono, & Suhartono. (2023). Pendidikan Literasi dan Edukasi Politik untuk Masyarakat Keboansikep Sidoarjo dalam PILKADA Sidoarjo 2020. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 54–62. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.289>
- Syafitri, A. N., Kabupaten, A., Selatan, B., Kepulauan, P., Belitung, B., Athahirah, A. U., Stp, S., & Si, M. (2024). *Literasi Politik Masyarakat Dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Yhasmid, N. F. (2023). *Sistem Kekerabatan Dan Literasi Politik Terhadap Kepemimpinan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Patampanua The Effect Of Kinship Systems And Political Literacy On Leadership In The Election Of Village Heads In Patampanua District*.